

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN POLITIK DINASTI JOKOWI PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM

Rhesqa Syadza SyafaZahira¹, Farikana Adilla²
rhesqa41@gmail.com¹, farikanaadila12@gmail.com²
Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Penelitian ini membahas metode analisis framing dalam unggahan berita online pada media Kompas.com tentang isu politik dinasti Jokowi dalam Pemilihan Presiden tahun 2024. Model analisis yang digunakan adalah model analisis milik Robert. N. Entman. Ada lima berita yang dianalisis dalam rentang waktu 29 Januari-3 Juni 2024. Di antaranya adalah dengan (1) "TPN Ganjar Mahfud: Masa Mau Punya Wapres seperti Gibran?", (2) "Wacana anak – mantu Jokowi maju pilkada Indonesia dianggap darurat "politik dinasti"", (3) "Putusan MA diperiksa bisa semakin menguatkan dinasti politik", (4) "Isu Politik Dinasti Jokowi, Pakar Konstitusi tidak dirancang untuk keluarga", (5) "Saat Gibran enggan mengomentari putusan MA dinilai muluskan dinasti politik Jokowi". Setelah dianalisis ditemukan adanya agenda framing dalam kelima berita yang diunggah oleh Kompas.com, yakni dalam pemilihan isu dan penonjolan aspek maupun pendefinisian masalah dalam isu politik dinasti Jokowi, latar belakang awal mula permasalahan politik dinasti Jokowi, penilaian moral terhadap isu politik dinasti Jokowi yang menuai pro-kontra, dan penemuan solusi untuk mengatasi isu politik dinasti Jokowi. Ditemukan bahwa politik dinasti Jokowi adalah kebenaran mutlak yang tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Kata Kunci: Analisis Framing, Robert N. Entman, Media Online.

ABSTRACT

This research discusses the framing analysis method in online news uploads on Kompas.com media regarding the political issue of the Jokowi dynasty in the 2024 Presidential Election. The analysis model used is Robert's analysis model. N. Entman. There are five news stories analyzed in the period 29 January-3 June 2024. Among them is the (1) "TPN Ganjar-Mahfud: Do you want to have a vice president like Gibran?", (2) "The discourse of Jokowi's sons and daughters-in-law to run for the Indonesian regional elections is considered a "dynasty politics" emergency," (3) "The Supreme Court's decision being examined could further strengthen political dynasties," (4) "Political Issues of the Jokowi Dynasty, Constitutional Experts are not designed for families", (5) "When Gibran was reluctant to comment on the Supreme Court's decision, it was seen as smoothing Jokowi's political dynasty." After analysis, it was found that there was a framing agenda in the five news stories uploaded by Kompas.com, namely in selecting issues and highlighting aspects and defining problems in the political issues of the Jokowi dynasty, the background to the beginning of the political problems of the Jokowi dynasty, the moral assessment of the political issues of the Jokowi dynasty that reaped pros and cons, and finding solutions to overcome the political issues of the Jokowi dynasty. It was found that the Jokowi dynasty politics was an absolute truth that no longer needed to be considered.

Keywords: Framing Analysis, Robert N. Entman, Online Media.

PENDAHULUAN

Pemilihan calon Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan salah satu ajang yang menarik dari berbagai kalangan, baik media, politisi, maupun masyarakat umum. Media massa memberikan sajian berita dari sisi terhadap para bakal calon Presiden

yang maju dalam pemilihan Presiden, media mulai membentuk opini masyarakat dalam memberitakan para calon.

Pemilihan Presiden (Pilpres) selanjutnya masih akan dilangsungkan pada 2024 mendatang, tetapi riuh-riuh para calon sudah dimulai. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan media massa yang perlahan mengusung beberapa yang diprediksi akan menjadi calon Presiden 2024. (Nitra Galih Imansari, 2021) Politik memiliki dampak besar dalam perjalanan suatu negara. Dinamika politik yang positif mendukung kemajuan, sementara yang negatif dapat membuat negara terbelakang. Politik memengaruhi berbagai aspek kehidupan negara dan bisa mengubah sistemnya. Menurut Harold Laswell, politik mempelajari bagaimana kekuasaan dibentuk dan didistribusikan di suatu negara. Dinasti politik adalah regenerasi kekuasaan berbasis hubungan keluarga. Di Indonesia, ini sering terjadi di tingkat lokal, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, di mana anggota keluarga pejabat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakilnya. Fenomena ini bukan hal baru dan sudah ada sejak zaman kerajaan. Budaya pewarisan kekuasaan dari keluarga ke keluarga masih bertahan meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi. Era reformasi bahkan memperkuat dinasti politik karena otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Praktik dinasti politik bisa menjadi sumber kontroversi dalam politik, terkadang secara tidak disengaja melibatkan nepotisme dan kontroversi dalam dunia politik.

Politik memiliki dampak besar dalam perjalanan suatu negara. Dinamika politik yang positif mendukung kemajuan, sementara yang negatif dapat membuat negara terbelakang. Politik memengaruhi berbagai aspek kehidupan negara dan bisa mengubah sistemnya. Menurut Harold Laswell, politik mempelajari bagaimana kekuasaan dibentuk dan didistribusikan di suatu negara (Sucipto et al., 2023).

Dinasti politik adalah regenerasi kekuasaan berbasis hubungan keluarga. Di Indonesia, ini sering terjadi di tingkat lokal, seperti provinsi, kabupaten, atau kota, di mana anggota keluarga pejabat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakilnya. Fenomena ini bukan hal baru dan sudah ada sejak zaman kerajaan. Budaya pewarisan kekuasaan dari keluarga ke keluarga masih bertahan meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi. Era reformasi bahkan memperkuat dinasti politik karena otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Praktik dinasti politik bisa menjadi sumber kontroversi dalam politik, terkadang secara tidak disengaja melibatkan nepotisme dan kontroversi dalam dunia politik (Sucipto et al., 2023).

Dinasti politik yang berpengaruh dalam pemilihan pemimpin daerah. Dinasti politik merupakan fenomena umum yang telah lama hadir di banyak negara demokrasi modern. mengenai dinasti politik, dinasti politik merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang-orang tertentu yang masih terkait dalam ikatan keluarga. Dinasti politik merujuk pada kelompok atau keluarga politik yang menguasai posisi kekuasaan secara berurutan. Dinasti politik sering kali melibatkan keturunan dari figur politik yang telah menjabat sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam mengenai pengaruh keturunan terhadap kepemimpinan dan implikasinya pada proses demokrasi (Komunikasi et al., 2024).

Politik dinasti atau Dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang kuat Bahkan kekuasaan politik itu bukan hanya sekedar fenomena politik saja, tetapi sudah menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur di berbagai daerah. Pada masa reformasi, dinasti politik terus terjadi. Hal yang menjadi sorotan saat ini adalah keluarga presiden Joko Widodo. Isu tersebut bukan muncul begitu saja (Maydani et al., 2024).

Akibat dari dinasti-dinasti tersebut bagi pemerintahan dapat mencederai berlangsungnya demokrasi di Indonesia, para pendahulu negara telah mendirikan negara

dengan dasar dan asas demokrasi semua kepentingan adalah pada dasarnya ditujukan kepada rakyat bukan kepada penguasa atau golongan tertentu, terlihat jelas dalam Pancasila nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam sila keempat tersebut kekuasaan tertinggi terletak pada kekuasaan rakyat atau ditangan rakyat atau yang disebut juga dengan kedaulatan rakyat

Apabila politik dinasti terus dilancarkan oleh kekuasaan maka dampak yang akan terjadi adalah, pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang tujuan akhirnya adalah kekuasaan, kedua, menutup kesempatan rakyat yang berpotensi menjadi pemimpin yang berkualitas dan mumpuni, ketiga, akan sulit mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan adil. (Maydani et al., 2024).

Kerangka Teori

Analisis Framing

Analisis framing adalah salah satu system yang digunakan untuk menganalisis isi media, sama halnya seperti analisis isi dan analisis semiotika. Bentuk media yang dianalisis tidak hanya media massa, tetapi bisa juga media internal organisasi, buku atau website. Analisis framing secara sederhana dapat dikatakan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau siapa saja) yang dibingkai oleh media. Pembingkaiannya tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Di sini realitas sosial diartikan dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknis jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Pada hakikatnya framing merupakan salah satu bentuk untuk memandang bagaimana media menceritakan suatu peristiwa. Penyampaian informasi tersebut tergambar pada “cara pandang,” hal tersebut dapat memengaruhi hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing merupakan analisis yang dipakai untuk mengetahui perspektif suatu media dalam mengkonstruksi realitas (Ayomi, 2021).

Analisis framing melihat bagaimana media memahami dan membingkai peristiwa. Fokus utama analisis framing adalah pembentukan pesan dari teks. Framing terutama melihat bagaimana media membuat pesan atau peristiwa. Analisis framing menentukan perspektif atau perspektif yang digunakan wartawan ketika mereka memilih masalah dan menulis berita. Ini juga menentukan bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca. Oleh karena itu, analisis framing ini meneliti pembingkaiannya realitas (peristiwa, individu, kelompok) yang dilakukan media. Pembingkaiannya ini adalah proses konstruksi, yang berarti realitas dimaknai dan dikonstruksi dengan cara tertentu. Media menggunakan framing untuk menonjolkan atau memberi penekanan pada aspek tertentu yang diinginkan media. Akibatnya, hanya bagian tertentu yang menarik perhatian, memiliki makna yang lebih besar, dianggap lebih penting, dan memengaruhi pemirsa (Ayomi, 2021).

Analisis framing Robert. N. Entman

Robert. N. Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Konsep mengenai framing ditulis dalam sebuah artikel untuk jurnal of political communication dan tulisan lain yang mempraktikkan konsep dalam studi kasus pemberitaan media. Konsep framing Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu lain.

Entman membagi framing dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan aspek atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti atau diingat khalayak. Aspek

yang ditonjolkan memiliki kemungkinan besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu isu. Menurut Entman dalam Eriyanto (2002 : 221) framing merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh seorang jurnalis untuk menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang itu akan menentukan sebuah fakta apa yang akan ditulis, aspek apa yang akan ditonjolkan, dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Dalam konsep Entman framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Dalam pendekatan ini perangkat framing dapat dibagi dalam empat elemen yaitu : Define problems (pendefinisian masalah). Elemen pertama merupakan bingkai yang paling utama, bagaimana peristiwa atau isu bisa dipahami. Isu yang sama dapat dipahami secara berbeda karena pembingkai yang berbeda menyebabkan realitas yang berbeda pula. Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah). Elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (what), tetapi bisa juga berarti siapa (who) (Alrizki & Aslinda, 2022).

Bagaimana cara kita memahami suatu peristiwa akan memengaruhi siapa atau apa yang dianggap sebagai sumber masalah. Membuat penilaian moral. Elemen kerangka ini digunakan untuk membenarkan atau memberikan justifikasi pada definisi permasalahan. Setelah suatu permasalahan didefinisikan, penyebab yang mendasarinya harus ditentukan, dan diperlukan argumen yang kuat untuk mendukung pandangan tersebut. Gagasan yang diangkat berkaitan dengan hal-hal yang sudah dikenal dan akrab bagi masyarakat. Rekomendasi penanganan (fokus pada penyelesaian). Elemen ini berfungsi untuk menilai keinginan wartawan. Pilihan langkah untuk menyelesaikan masalah sangat dipengaruhi oleh bagaimana peristiwa tersebut didefinisikan dan siapa yang dianggap sebagai penyebabnya. Bagaimana pandangan terhadap suatu peristiwa atau isu? Dalam kategori apa? Atau sebagai apa? Apa yang menjadi penyebab dari peristiwa tersebut? Apa yang dianggap sebagai faktor penyebab dari suatu permasalahan? Siapa saja pihak yang dianggap sebagai pelaku penyebab masalah? Nilai moral apa yang disampaikan untuk menjelaskan suatu isu? Nilai moral apa yang digunakan untuk menguatkan atau menolak suatu tindakan? Solusi apa yang diajukan untuk mengatasi isu atau masalah tersebut? Langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan?

Elemen perangkat framing Robert N. Entman secara ringkas juga dijelaskan Abrar dalam Waziz (2017: 262), definisi problem yaitu mendefinisikan masalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada nilai-nilai kultural yang berlaku umum. Diagnosing causes, mendiagnosa sumber atau akar masalah dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang terlibat dalam permasalahan. Make moral judgement yakni memberikan penilaian moral terhadap sumber masalah dan efek apa yang ditimbulkan. Dan yang terakhir treatment recommendation, menawarkan solusi dengan menunjukan perlakuan tertentu dan dugaan efek yang mungkin nantinya akan terjadi. Keempat elemen diatas merupakan perangkat analisis yang dapat menunjukan framing dari suatu media. Kecendrungan wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat elemen framing Entman diatas. Bagaimana wartawan dan media mendefinisikan masalah ke dalam bentuk berita, memperkirakan masalah atau sumber masalah, menyajikan nilai moral yang bagaimana, dan penekanan penyelesaian apa yang ditawarkan ketika menulis berita (Alrizki & Aslinda, 2022).

Komunikasi Massa

Banyak pakar memberikan penjelasan mengenai arti dari komunikasi massa. Setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda, sehingga makna yang diungkapkannya pun

bervariasi. Meski demikian, terdapat beberapa kesamaan di antara berbagai definisi tersebut. Definisi termudah mengenai komunikasi massa berasal dari Bittner, yang menyatakan bahwa komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media massa kepada audiens yang besar. Poin utama adalah bahwa komunikasi massa sangat memerlukan alat yang dikenal sebagai media massa. Media massa tidak dapat beroperasi secara independen, karena terdapat individu-individu yang mengolah informasi sebelum disampaikan kepada publik, yang umumnya disebut gatekeeper. Informasi yang diterima oleh masyarakat pada dasarnya telah dikelola oleh gatekeeper dan dipadukan dengan visi serta misi media tersebut. Di sisi lain, Gerbner mendeskripsikan komunikasi massa sebagai proses produksi dan distribusi yang didasarkan pada teknologi dan lembaga, serta arus pesan yang bersifat berkelanjutan dan mudah diakses oleh masyarakat industri. Gerbner menekankan bahwa komunikasi massa menghasilkan produk berupa pesan-pesan yang dikomunikasikan kepada publik. Proses distribusi dilakukan secara teratur pada waktu yang telah ditentukan, seperti harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Menurut Gerbner, komunikator harus terorganisir, artinya tidak bisa dilakukan secara individu (Siregar & Qurniawati, 2022).

- 1) Hafied Cangara menyatakan bahwa komunikasi massa diartikan sebagai proses komunikasi yang menyampaikan pesan dari sumber terorganisir kepada masyarakat dalam jumlah besar melalui media seperti radio, televisi, surat kabar, dan film. Pesan dalam komunikasi massa bersifat satu arah dan umumnya mendapatkan umpan balik yang lambat atau terbatas. Selain itu, informasi yang diperoleh lewat media massa disebarkan dengan cepat, bersamaan, dan secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi massa merupakan cara penyampaian pesan melalui media yang digunakan. Dengan kata lain, komunikasi massa berfungsi sebagai penghubung antara media, baik cetak maupun elektronik, serta media online. Selanjutnya, menurut Effendy dalam bukunya yang berjudul Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, karakteristik komunikasi massa dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 2) Komunikasi massa bersifat umum, yang berarti bahwa pesan yang disampaikan melalui media massa dapat diakses oleh semua orang. Namun, jika media dalam format cetak, seperti film, radio, dan televisi, digunakan untuk tujuan pribadi dalam lingkungan yang terbatas, maka tidak dapat dikategorikan sebagai komunikasi massa.
- 3) Komunikasi bersifat heterogen, yang berarti terdapat kombinasi jumlah komunikasi yang besar dalam komunikasi massa dan akses untuk mendapatkan pesan-pesan komunikasi, yang berkaitan dengan sifat heterogen dari komunikasi;
- 4) Media massa menciptakan keserempakan—hubungan dengan sejumlah besar orang yang berada jauh dari komunikator dan satu sama lain dalam keadaan terpisah. Radio dan televisi memiliki keunggulan dibandingkan media cetak dalam hal ini, karena keduanya dapat diakses pada waktu yang berbeda dan lebih selektif; Hubungan antara komunikator dan komunikan bersifat non-pribadi, artinya dalam komunikasi massa, interaksi berlangsung antara komunikator dan komunikan yang tidak dikenal secara langsung, di mana individu hanya dikenali melalui peran umum mereka sebagai komunikator. Sifat non-pribadi ini muncul karena teknologi serta penyebaran yang bersifat massal, dan juga karena persyaratan peran komunikator yang bersifat umum. Dalam perkembangan media massa, kini telah muncul inovasi baru yang dikenal sebagai media online. Oleh karena itu, media online tidak termasuk dalam kategori media cetak maupun elektronik, melainkan dianggap sebagai media baru (Siregar & Qurniawati, 2022).

Media Massa (Online)

Media massa adalah saluran komunikasi dan informasi yang menyebarluaskan informasi secara luas dan dapat diakses oleh publik pada waktu yang bersamaan. Secara

umum, media massa dapat dipahami sebagai kumpulan alat (teknologi) yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan secara bersamaan dan menjangkau audiens yang besar. Media massa merujuk pada berbagai bentuk komunikasi yang, melalui evolusi dan perkembangan, kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti majalah, film, radio, televisi, musik rekaman, buku, serta surat kabar baik dalam format cetak maupun digital. Media massa adalah saluran komunikasi dan informasi yang menyebarluaskan data secara luas dan bisa diakses oleh masyarakat secara bersamaan. Secara umum, media massa dapat dimaknai sebagai kumpulan alat (teknologi) yang berfungsi untuk mendistribusikan pesan dari pengirim kepada penerima pada waktu yang hampir bersamaan dan menjangkau audiens yang besar. Media massa mencakup berbagai jenis media komunikasi yang, melalui proses evolusi, kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti majalah, film, radio, televisi, rekaman musik, buku, serta surat kabar baik cetak maupun online.

Pesan yang disampaikan lewat media massa memiliki sifat publik karena ditujukan kepada masyarakat umum dan berkaitan dengan kepentingan publik. Ini berarti pesan tersebut tidak ditujukan untuk individu atau kelompok spesifik. Inilah yang membedakan media massa dari media nir massa. Surat, telepon, telegram, dan teks, misalnya, merupakan jenis media nir massa, bukan media massa, karena ditujukan kepada individu tertentu. Dengan demikian, jelas bahwa media seperti surat kabar, baik yang cetak maupun online seperti *Tempo.co*, *detik.com*, serta radio dan televisi, dikategorikan sebagai media massa karena ditujukan kepada masyarakat luas dan berisi pesan-pesan yang relevan dengan kepentingan umum.

Kelebihan media massa dalam membangun dan membongkar realitas terletak pada beritanya, selain juga pada bentuk isi lainnya seperti editorial, opini, dan karikatur di media cetak, serta acara talk show di media elektronik. Dalam pemberitaan, media massa umumnya memberikan perhatian khusus pada peristiwa atau isu tertentu dan mengesampingkan yang lainnya, yang dikenal dengan agenda setting. Selain itu, media massa juga menekankan pada substansi masalah tertentu terkait peristiwa atau isu tertentu dan mengabaikan masalah lainnya, yang disebut framing. Dengan cara ini, media massa menciptakan dan merobohkan realitas.

Secara fundamental, media massa berfungsi sebagai media untuk diskusi publik mengenai suatu isu yang melibatkan tiga pihak: jurnalis, sumber berita, dan masyarakat. Ketiga pihak ini mengandalkan peran sosial masing-masing, dan hubungan di antara mereka terjalin melalui teks yang mereka konstruksi. Pendekatan analisis framing menganggap wacana berita sebagai arena simbolis di mana pihak-pihak yang berkepentingan bersaing dalam menyampaikan pendapat tentang pokok masalah dalam wacana tersebut. Masing-masing pihak berupaya menawarkan sudut pandang untuk memberikan makna pada suatu isu agar diterima oleh publik. (Ayomi, 2021).

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menyelesaikan masalah menggunakan data yang diperoleh dari pengalaman. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memberikan penjelasan, mengatur tanda-tanda komunikasi, mendemonstrasikan prediksi, atau menguji teori tertentu. Sebaliknya, tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menyajikan representasi dan/atau pemahaman tentang bagaimana dan mengapa fenomena atau kenyataan komunikasi muncul. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya. Sedangkan teknik penelitian, peneliti menggunakan analisis framing Robert N. Entman (Siregar & Qurniawati, 2022).

Tabel 1.

No	Tanggal Terbit	Judul Berita Media Online Kompas.com
1	29 Januari 2024	TPN Ganjar-Mahfud: Masa Mau Punya Wapres seperti Gibran?
2	15 Maret 2024	Wacana anak – mantu Jokowi maju pilkada indonesia dianggap darurat "politik dinasti"
3	15 Maret 2024	Putusan MA diperiksa bisa semakin menguatkan dinasti politik
4	31 Mei 2024	Isu Politik Dinasti Jokowi, pakar Konsitusi tidak dirancang untuk keluarga
5	3 Juni 2024	Saat Gibran enggan mengomentari putusan MA dinilai muluskan dinasti politik jokowi

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis model framing yang dikemukakan oleh Robert N. Entman. Metode analisis pembingkai ini membantu kita memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas dan bagaimana berita dipahami dan disajikan oleh media. Analisis bingkai sangat berguna untuk meneliti konteks sosial-budaya wacana antara berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme yang dilalui berita untuk membangun, memelihara, mereproduksi, mengubah, atau menghancurkan ideologi. Analisis framing meneliti siapa yang hadir dalam struktur kekuasaan, pihak mana yang diuntungkan dan yang dirugikan, siapa yang tertindas dan siapa yang ditindas, langkah politik mana yang didukung dan yang tidak, dan sebagainya. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah sebuah pengukuran tidak didukung.

Model analisis pembingkai Robert N. Entman menggunakan empat elemen pembingkai yang terkait dengan penyediaan definisi, penjelasan, dan rekomendasi dalam wacana untuk menyoroti kerangka pemikiran tertentu tentang peristiwa yang direncanakan. Alat kerangka kerja tersebut adalah:

"Definisi masalah" adalah cara memandang suatu kejadian atau masalah sebagai apa atau jenis masalahnya. Mendiagnosis penyebab atau asal suatu masalah melibatkan pemeriksaan apa yang memicu suatu kejadian, apa yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut, dan aktor mana yang mungkin bertanggung jawab atas masalah tersebut. Membuat penilaian moral, nilai-nilai moral apa yang digunakan untuk menjelaskan masalah, nilai-nilai moral apa yang digunakan untuk membenarkan tindakan. Rekomendasi penanganan, solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan dan keraguan, jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi permasalahan (Reformansyah & Widiarti, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompas.com kembali mengangkat isu tentang pemberitaan dinasti politik Jokowi pada pemilihan presiden tahun 2024. Kebenaran yang terungkap mengenai dinasti politik Jokowi sempat menjadi topik yang hangat di kalangan media. Pada penelitian ini, peneliti memilih lima berita yang diunggah dalam rentang waktu 29 Januari – 3 Juni 2024. Peneliti menggunakan analisis framing Robert N. Entman dalam penelitian ini. Berdasarkan pengamatan penulis pembingkai yang dilakukan oleh Kompas.com pada lima berita mengenai dinasti politik Jokowi pada pemilihan presiden 2024 berikut: Model analisis framing Robert N. Entman menggunakan empat perangkat framing yang merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka pikir tertentu terhadap peristiwa yang direncanakan. Perangkat framing tersebut yaitu:

Tabel 2.

Define problem (mendefinisikan masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Diagnose cause (memperkirakan masalah atau menemukan masalah)	Peristiwa yang dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah
Make moral judgement (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Treatment recommendation (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Dalam pemberitaan mengenai dinasti politik Jokowi yang menimbulkan respon pro dan kontra dari kalangan masyarakat yang dikemas oleh *kompas.com* lebih berfokus kepada track record Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2021-2024. Dalam proses penyusunan berita di media online *kompas.com*, dilakukan analisis menggunakan model Robert N. Entman terhadap lima artikel, yang mengungkapkan inti dari konstruksi berita di *kompas.com*. Analisis ini melihat dari dua dimensi utama Robert N. Entman, yaitu pemilihan informasi dan penekanan aspek yang berkaitan dengan pilihan fakta serta realitas yang rumit dan cara penulisan beritanya. Berikut adalah pembahasan tentang isu dinasti politik Jokowi yang dipublikasikan dalam periode 29 Januari hingga 3 Juni 2024. (Reformansyah & Widiarti, 2023).

Define Problem

Konsep dinasti berasal dari negara yang memiliki struktur kerajaan. Dinasti dalam konteks politik telah lama ada dalam sistem demokrasi. Selama era reformasi, dinasti politik tetap berlangsung tanpa henti. Peristiwa yang terjadi saat ini menarik perhatian masyarakat karena adanya persaingan politik dalam pemerintahan Jokowi. Dalam ranah politik masa kini, dinasti politik sering menjadi topik perdebatan karena dapat mempengaruhi sistem politik suatu negara dengan signifikan. Fenomena ini menghasilkan dampak yang beragam dan penuh kontroversi terhadap politik, ekonomi, dan struktur sosial masyarakat. Dinasti politik di era Jokowi menampilkan dominasi kelompok keluarga atau orang-orang terdekat dalam kekuasaan. Jokowi, yang pertama kali menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014 dan terpilih kembali untuk periode kedua pada tahun 2019, menunjukkan tanda-tanda dinasti politik melalui keterlibatan keluarganya dan orang-orang dekatnya di dalam kekuasaan. Hal ini terjadi karena anak dan menantu Jokowi berperan dalam dunia politik Indonesia dan menduduki posisi penting. Penguatan politik dinasti Jokowi mulai terlihat dalam Pilkada 2020, di mana Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai Wali Kota Medan. (Aulia et al., 2023).

Hukum yang lemah menjadi salah satu elemen penyebab berkembangnya politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pilkada berusaha untuk menekan praktik politik dinasti melalui peraturan yang melarang konflik kepentingan. Di Pasal 7, diatur bahwa kandidat pemimpin daerah tidak diperbolehkan memiliki konflik kepentingan dengan pejabat yang sedang menjabat atau dengan politisi lainnya. Dalam hal ini, calon pemimpin daerah tidak boleh memiliki hubungan keluarga, perkawinan, atau keturunan langsung ke atas, bawah, dan samping dengan pejabat yang sedang menjabat, kecuali jika sudah melewati satu periode jabatan. Namun, dalam praktiknya, keputusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

melalui putusan Nomor 34/PUU-XIII/2015, karena dianggap memiliki kepentingan politik dan bersifat asumptif. Asumsi tersebut menyatakan bahwa setiap kandidat yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pejabat yang sedang menjabat akan otomatis membentuk dinasti politik yang dapat merugikan negara, tanpa menilai kemampuan dan integritas kandidat tersebut.

Selanjutnya, terdapat keputusan dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Gibran Rakabuming Raka, anak tertua presiden Joko Widodo, resmi mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Terpilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden memicu berbagai tanggapan dari masyarakat terkait keberadaan politik dinasti pada era kepemimpinan presiden Jokowi. Lebih jauh, banyak yang berpendapat bahwa Gibran tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dia dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf q tentang pemilu, yang mengatur syarat minimal untuk calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, Ketua MK malah mengubah isi undang-undang tersebut, yang memicu perdebatan di masyarakat. Banyak yang menentang keputusan Ketua MK, yang dianggap melanggar kode etik dan mencerminkan masalah dalam birokrasi. Ternyata, Ketua MK memiliki hubungan keluarga sebagai adik ipar Presiden Jokowi, yang juga merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, Kaesang diangkat menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk periode 2023-2028. Kejadian ini mengubah citra kepemimpinan presiden Jokowi, yang selama ini dianggap tidak melibatkan keluarganya dalam dunia politik. (Aulia et al., 2023).

Diagnose Cause

Salah satu topik politik yang masih hangat diperbincangkan menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 di Indonesia adalah masalah politik dinasti. Berbagai media, termasuk media cetak, online, serta platform media sosial yang populer di kalangan generasi muda, tengah membahas berita mengenai dinasti politik yang melibatkan keluarga Jokowi. Politik dinasti merujuk kepada praktik di mana kekuasaan dalam politik dipegang oleh anggota keluarga atau kerabat yang saling menggantikan dalam posisi politik. Perbincangan tentang dinasti politik semakin intensif menjelang pemilihan presiden 2024, mengingat salah satu calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, adalah putra dari presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo.

Pemilihan Gibran sebagai calon wakil presiden mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak karena keterlibatannya dalam proses pemilihan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyetujui gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 huruf q dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, yang saat ini menyatakan, “Berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat dalam posisi yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.” Selain Gibran, hal lain yang menjadi perhatian terkait dinasti politik Jokowi adalah keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang merupakan saudara ipar dari Presiden Jokowi. Isu politik dinasti ini menjadi bahan diskusi di banyak media, termasuk media Tempo. Di kanal Youtube Tempodotcom yang diunggah pada 2 November 2023 dengan tajuk “Dinasti Politik Jokowi Menghancurkan Demokrasi | Opini Tempo” terdapat pendapat dari media Tempo mengenai isu politik dinasti Jokowi yang menempatkan anaknya, Gibran, sebagai calon wakil presiden. (Rahman & Nurhadi, 2024).

Make Moral Judgement

Seperti yang terjadi baru-baru ini, melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 13 Peraturan KPU tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 169(q) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 mengatur batasan usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun. Awalnya, KPU menyatakan tidak akan mengubah apa pun

dalam pasal versi baru ini. Namun, ketika putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabumin, mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo Subianto, KPU akhirnya mengubah pasal tersebut seiring dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi mengubah pasal tersebut sebagai berikut: ``Syarat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah berusia minimal 40 tahun atau menduduki jabatan terpilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden daerah." Berkat keputusan itu, Gibran tetap dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, meski usianya baru 36 tahun, sebab ia memenuhi syarat untuk menjadi Wali Kota Solo.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuai kritik publik yang luas dan penyelidikan semakin intensif terkait apakah Ketua Mahkamah Konstitusi yang membuat keputusan tersebut adalah Anwar Usman, saudara ipar Presiden Jokowi. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi berarti telah dibuat kebijakan atau telah dilakukan tindakan untuk menggunakan kekuasaan guna membantu keluarga dan memperoleh status khusus. Dapat dikatakan, putusan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan upaya untuk menegakkan politik dinasti. Sebab, sesungguhnya yang bisa disebut politik dinasti itu bukan sekadar bagian seleksinya saja, tetapi tata cara seleksi dan penyampaian. Tak berhenti sampai di situ, Gibran Raka Bumin maju dalam Pilpres 2024, namun pada 23 September 2023, adik kandung Gibran Raka Bumin, Kaesang Pangarep, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang mengundurkan diri dari jabatannya. pada tanggal 25 September 2022, dua hari setelah ia resmi dilantik sebagai eksekutif. Anak ketiga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028. Dengan banyaknya anggota keluarga Jokowi yang memegang posisi kunci di pemerintahan, berkembang persepsi publik bahwa pemerintahannya menjalankan politik dinasti. Melihat sepak terjang Presiden Jokowi dan keluarganya, dapat disimpulkan bahwa ini adalah model politik dinasti "transregional", model "reuni keluarga" sebagaimana diutarakan Robert Endy Jawen. Politik dinasti era Jokowi dipandang sebagai patologi birokrasi, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindakan ini dianggap sebagai korupsi besar di mana undang-undang pemerintah dimanipulasi dan diubah hanya untuk keuntungan kelompok tertentu. Hal ini niscaya akan mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Ketua Mahkamah Konstitusi menyalahgunakan hak istimewanya untuk menguntungkan keponakannya. Penyakit birokrasi yang terbesar adalah korupsi, yang darinya timbul banyak penyakit lainnya.(Aziz & Wahid, 2021).

Treatment Recommendation

Untuk mengatasi isu politik dinasti pada Pemilihan Presiden tahun 2024 salah satunya adalah pemerintah harus membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang hak tersebut, sehingga di Indonesia tidak ada lagi isu politik dinasti. Selain itu, dari partai politik harus melakukan reformasi internal seperti memberikan kesempatan kepada kader partai yang memiliki kualitas dan berpengalaman dalam bidangnya (Aziz & Wahid, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan terkait dinasti Jokowi dalam pemilihan presiden 2024 di media Kompas.com. Melalui metode analisis framing, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana Kompas.com membingkai isu dinasti politik tersebut dalam pemberitaannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung menggunakan bingkai positif dalam memberitakan dinasti Jokowi. Media ini menonjolkan prestasi dan kontribusi para anggota keluarga Jokowi dalam bidang politik dan pemerintahan, serta menekankan dukungan publik terhadap mereka. Berita-berita yang diangkat sering kali menyoroti

keberhasilan program-program yang diinisiasi oleh keluarga Jokowi, serta respons positif dari berbagai kalangan.

Di sisi lain, Kompas.com juga tidak mengabaikan kritik dan pandangan negatif terkait dinasti politik. Namun, berita-berita kritis ini lebih sering ditempatkan dalam konteks opini atau disampaikan dengan narasi yang seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mempertahankan objektivitas, kecenderungan untuk memberikan framing positif tetap terlihat dominan.

Secara keseluruhan, framing pemberitaan dinasti Jokowi di Kompas.com mencerminkan sikap yang lebih mendukung dan menyoroti sisi positif dari fenomena ini. Namun, media tetap memberikan ruang bagi berbagai pandangan, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil. Temuan ini mengindikasikan adanya pengaruh tertentu dalam bagaimana media membingkai isu-isu politik yang melibatkan tokoh-tokoh penting dan keluarganya, serta pentingnya analisis kritis terhadap pemberitaan media untuk memahami bias dan framing yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrizki, D., & Aslinda, C. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Tidak Lockdown. *Journal of Political Communication and Media* Juni, 2022(1), 24–36.
- Aulia, S. S., Salsabila, & Pitakon, F. A. (2023). Analisis Politik Dinasti Jokowi dalam Lensa Patologi Birokrasi: Grand Corruption. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(5), 1044–1052.
- Ayomi, H. V. (2021). Analisis Framing Media Online Mengenai Pemberitaan Deklarasi Beny Wenda. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 03(03), 118–125. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/732%0Ahttps://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/732/555>
- Aziz, A., & Wahid, U. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Politik Dinasti Jokowi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Media Online Kompas.Com Dan Okezone.Com. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.5.1.1-10>
- Komunikasi, J., Politik, I., Dalam, P., Calon, K., & Daerah, P. (2024). Retorika. 1.
- Maydani, R., Husna, M. F., Winarti, S. L., Harahap, N., & Ardiansyah, A. (2024). Politik Dinasti di Negara Demokrasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), 950–955. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075>
- Nitra Galih Imansari. (2021). Konstruksi Berita Media Massa dalam Bingkai Kapitalisme Media. *Kaljaga Journal of Communication*, 3(1), 47–62.
- Rahman, G., & Nurhadi, J. (2024). Konstruksi Isu Dinasti Politik Jokowi dalam Tayangan Youtube Opini Tempo: Analisis Wacana Kritis. *An-Nas*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.32665/annas.v8i1.2681>
- Reformansyah, M. A., & Widiarti, P. W. (2023). Analisis framing Robert Entman tentang berita kompas.com dan detik.com tentang kasus “IDI Kacung WHO.” *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(4), 306–314. <https://doi.org/10.21831/lektur.v5i4.19180>
- Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.55985/jnmc.v1i1.1>
- Sucipto, H., Sitinjak, S., & Sujatmoko, I. (2023). Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial*, 1(3), 83–90. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>